

## Sekda DIY Tegaskan Tak Ada Cuti Tambahan

**YOGYA (KR)** - Hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY langsung menjalankan tugas dan layanan publik seperti biasa. Semua itu dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen dari para ASN dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Tidak hanya itu berdasarkan laporan yang ada pada hari pertama masuk setelah libur Lebaran tidak ditemukan adanya ASN yang membolos.

"Libur lebaran dan cuti bersama yang diberikan bagi para ASN saya kira sudah cukup panjang, yaitu selama delapan hari. Saat hari pertama masuk setelah libur Lebaran saya sudah memonitor dan bertemu dengan seluruh kepala OPD. Semuanya masuk, dan memang tidak boleh ada cuti tambahan," kata Sekda DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan, Selasa (8/4).  
Diungkapkan, meski pada hari pertama masuk sejumlah

OPD melakukan kegiatan halal bi halal atau silaturahmi. Tapi aktivitas di perkantoran yang ada di lingkungan Pemda DIY sudah kembali normal seperti biasa. Karena kegiatan silaturahmi atau halal bi halal yang dilakukan sifatnya hanya internal. Jadi tidak sampai mengganggu layanan kepada publik.  
"Memang pada hari pertama masuk ada ritual yang tidak bisa dihindari, seperti silaturahmi atau halal bi halal. Tapi secara prinsip aktivitas

perkantoran sudah mulai normal. Bahkan saya sendiri sudah ke lapangan untuk cek persiapan Sekolah Rakyat," ungkapnya.  
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) DIY Amin Purwani menambahkan, pengawasan hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran menjadi kewajiban masing-masing kepala OPD yang ada di lingkungan Pemda DIY. Setelah

itu semua laporan tersebut akan diteruskan ke BKD DIY. Selanjutnya setelah semua laporan masuk BKD akan mencocokkan laporannya dengan absensi terintegrasi.  
"Setelah semua laporan ma-

suk akan kami cocokkan dengan absensi yang sudah terintegrasi. Seandainya ada yang melakukan pelanggaran nanti akan dikenakan sanksi sesuai disiplin pegawai/ASN," terangnya. **(Ria)-f**

## Universitas Janabadra Gelar Syawalan, Momentum Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan

**YOGYA (KR)** - Mengawali hari pertama masuk kerja setelah Lebaran, keluarga besar Universitas Janabadra (UJB) Yogyakarta mengadakan acara Syawalan 1446 H di Auditorium KPH Poerwokoesomo UJB, Jalan Tentara Rakyat Mataram 55-57 Yogyakarta, Selasa (8/4).



KR-Istimewa

**Keluarga besar UJB berjabat tangan saling memaafkan.**

Syawalan diikuti oleh segenap sivitas akademika UJB mulai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, ketua lembaga, para dosen, karyawan, pengurus Ikabadra dan para mahasiswa. Hikmah syawalan disampaikan oleh Prof Dr H Suwarno Dwijonegoro MPd (Guru Besar UNY) dilanjutkan ikrar syawalan dan diakhiri jabat tangan saling memaafkan.

Rektor UJB, Dr Risdiyanto mengatakan Syawalan menjadi momentum bagi segenap sivitas akademika UJB untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan demi kemajuan UJB. Rektor mengingatkan bahwa saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam kondisi yang kurang baik.

Menurut Rektor, ada dua

tantangan besar yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta (PTS) termasuk UJB. Pertama, adanya efisiensi besar-besaran oleh pemerintah yang mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat berbangsa dan bernegara. Tantangan kedua adalah persaingan antar perguruan tinggi swasta yang semakin ketat serta terjadi tren penurunan jumlah mahasiswa baru di semua PTS di Indonesia, hingga 10 persen.

Namun demikian di tahun ajaran 2024-2025, UJB justru mengalami kenaikan jumlah mahasiswa baru sebesar 5 persen pada semester gasal dan pada semester genap kenaikannya terbesar 25 persen. "Tentu upaya perbaikan harus

kita lakukan terus-menerus khususnya berkenaan dengan peningkatan kualitas pelayanan internal dan eksternal, serta peningkatan kualitas dosen dan karyawan," katanya.

Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra, Drs Surjadiman MM berharap UJB tetap menjadi universitas pilihan utama masyarakat. Menurutnya penambahan program studi baru, sangat diperlukan. "Pengurus Yayasan terus mendorong pimpinan universitas untuk meningkatkan akreditasi institusi dan prodi, meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah dan lainnya yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di UJB," katanya. **(Dev)-f**

## AGUS RIYANTO, FRAKSI PDI PERJUANGAN Butuh Rekayasa Lalu Lintas Urai Kemacetan Pusat Kota



KOTA YOGYAKARTA

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta yang duduk di Komisi C, Agus Riyanto, menilai kemacetan di pusat kota memang tidak bisa dihindari karena menjadi tujuan utama para wisatawan. "Tetapi jangan sampai kemacetan itu justru menimbulkan kesemrawutan. Itu yang harus diantisipasi agar meski kendaraan melaju dengan pelambatan namun tetap tertib. Apalagi ini kerap terjadi di pusat kota sehingga butuh ada rekayasa yang lebih terukur," urainya.

Menurutnya, rekayasa manajemen lalu lintas memang paling memungkinkan karena kapasitas jalan di Kota Yogyakarta sudah terbatas. Sehingga untuk memperluas lebar jalan pun sudah mustahil untuk dilakukan. Rekayasa yang dimaksud, imbuh Agus, salah satunya bersifat insidental. Misalnya ketika musim libur panjang diterapkan jalan searah di beberapa titik sebagai pintu masuk dan keluar kendaraan pribadi, maupun penyediaan kantong parkir insidental.

Oleh karena itu pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. "Kami akan melakukan kajian mendalam terkait akar permasalahan kemacetan di Kota Yogyakarta. Apakah ini disebabkan oleh volume kendaraan yang terus meningkat, tata ruang kota yang kurang ideal, manajemen lalu lintas yang belum optimal, atau faktor-faktor lainnya," tegasnya.



KR-Ardhi Wahdan

Di samping itu, dirinya bersama jajaran di Komisi C juga berencana untuk menggelar pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, kepolisian, akademisi, serta perwakilan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang komprehensif dalam merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

"Kami tidak ingin menjanjikan solusi instan, namun kami berkomitmen untuk bekerja keras mencari jalan keluar terbaik. Beberapa opsi yang mungkin dipertimbangkan antara lain adalah peningkatan infrastruktur jalan, penataan sistem transportasi publik yang lebih baik, rekayasa lalu lintas yang cerdas, hingga mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk lebih memilih transportasi yang berkelanjutan," urainya.

Kendati demikian, di sisi lain kepadatan arus lalu lintas ketika libur panjang juga menandakan tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat. Sehingga kondisi itu juga menjadi harapan positif terhadap roda perekonomian masyarakat. Akan tetapi berbagai rekayasa harus tetap dijalankan agar masyarakat tidak mengalami kerugian waktu dan biaya akibat terjebak macet. **(Dhi)-f**

## KOMISI A TEGAS KAWAL PENEGAKAN ATURAN

# Hentikan Sementara Izin Penggunaan Aset, Bongkar Reklame Melanggar



KOTA YOGYAKARTA

**YOGYA (KR)** - Komisi A DPRD Kota Yogyakarta sebagai salah satu alat kelengkapan dewan menunjukkan komitmennya dalam mengawal penegakan aturan. Kali ini berkaitan keberadaan reklame yang melanggar atau tidak sesuai ketentuan. Terutama untuk menghentikan sementara permohonan izin penggunaan aset serta membongkar reklame melanggar.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro, mengungkapkan sejak awal jajarannya memiliki perhatian besar terkait penegakan aturan yang menjadi tugas pokok dan fungsi komisinya. "Kami su-

dah memetakan dan tahap awal fokus terhadap reklame. Selanjutnya menara telekomunikasi, hotel dan kegiatan lain yang diatur melalui payung hukum," tandasnya.

Toro, sapaan akrabnya, menambahkan dalam pertemuan terakhir bersama tim eksekutif terdapat 335 titik reklame yang tersebar di berbagai sudut Kota Yogyakarta. Dari jumlah itu ada 51 reklame melanggar yang dalam tahap penertiban. Sebanyak 13 titik reklame di antaranya sudah berhasil dibongkar baik secara mandiri maupun pembongkaran paksa. Bentuk pelanggaran reklame cukup bervariasi mulai dari tidak mengantongi izin, tidak membayar retribusi hingga berdiri di kawasan larangan.

Terhadap puluhan reklame melanggar tersebut, prosedur penertiban juga sudah dilakukan melalui surat pemberitahuan. Bagi yang tidak mengindahkan atau membandel, maka konsekuensi pembongkaran harus diterima. "Kami ti-



KR-Ardhi Wahdan

**Ketua Komisi A, Susanto Dwi Antoro.**

dak pandang bulu itu milik siapa atau dibackingi oleh siapa. Sepanjang tidak sesuai aturan ya harus menerima konsekuensinya. Makanya kami ingin membersamai 100 hari kepemimpinan Hasto-Wawan agar selama itu permohonan izin penggunaan aset Pemkot untuk reklame agar dihentikan sementara," tegas Toro.

Dari proses penegakan tersebut diprediksi ada kehilangan pendapatan pajak



KR-Ardhi Wahdan

**Sekretaris Komisi A, R Candra Akbar Ishmata**

reklame hingga Rp 4 miliar. Akan tetapi jika tahun ini semua sudah tertib aturan maka proyeksi pendapatan bisa meningkat hingga Rp 16 miliar. Upaya itu pun sama sekali bukan untuk mengganggu iklim investasi di Kota Yogyakarta melainkan sebaliknya. Jika semua taat prosedur tanpa ada yang diistimewakan maka investor justru akan lebih tertarik karena transparansi dan akuntabilitas menjadi terjaga.

Bahkan, imbuh Toro,



KR-Istimewa

**Wakil Ketua Komisi A, Indaruwanto Eko Cahyono**

pendapatan daerah dari reklame bisa semakin optimal jika diterapkan skema beauty contest. Di mana titik lokasi yang paling strategis dilelang secara terbuka dengan harga tertinggi. Dengan demikian investor memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan aset pemerintah.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Indaruwanto Eko Cahyono, menambahkan penegakan aturan reklame sama sekali

bukan untuk membuat gaduh iklim investasi. Sebaliknya, investasi akan menggeliat mana kala aturan dapat ditegakkan secara konsisten. Hal ini karena akan membuat kegiatan masyarakat semakin terukur, tertata dan tertib. "Itu nanti akan linier dengan perijinan. Reklame melanggar bukan bagian dari investasi. Silakan berinvestasi namun harus taat aturan. Kami pun akan meminta instansi terkait untuk mempermudah perijinan," urainya.

Oleh karena itu, Ndaru sapaan akrabnya akan memberikan dukungan kepada Sat Pol PP selaku penegak aturan di tingkat eksekutif. Terutama menambah alokasi anggaran untuk pembongkaran reklame melanggar. Bahkan ketika Sat Pol PP menemui kendala teknis dalam penegakan reklame, jajaran Komisi A siap berada di garis terdepan untuk memberikan dukungan. "Kami juga menyoroti keberadaan reklame yang dipampang

logo aparat penegak hukum. Kalau itu iklan layanan masyarakat mungkin tidak menjadi persoalan, namun jika itu dikomersialkan dan tidak berijin harus ada langkah penertiban," katanya.

Sedangkan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogyakarta R Candra Akbar Ishmata, menurkan kepemimpinan baru di Kota Yogyakarta menjadi momentum yang tepat untuk menempatkan segala sesuatunya pada pedoman aturan yang berlaku. Sehingga dalam 100 hari Hasto-Wawan pihaknya turut memberikan dukungan terhadap aspek penegakan reklame. Hal ini agar jangan sampai Kota Yogyakarta menjadi hutan reklame hingga persoalan menjadi semakin pelik.

Dirinya pun kembali menegaskan, Komisi A tidak akan tebang pilih terhadap siapa di balik pendirian reklame. Sepanjang tidak patuh terhadap aturan maka harus ditertibkan tanpa pandang bulu. **(Dhi)**



**Papan reklame di kawasan Kridosono yang dalam tahap penertiban.**



**Jajaran Komisi A menjalankan fungsi pengawasan atas reklame.**

KR-Ardhi Wahdan